

HASIL KAJIAN DALAM RANGKA HARMONISASI PERATURAN DAERAH

NO.	PERATURAN DAERAH YANG DIKAJI	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PERDA	KAJIAN	KESIMPULAN/ SARAN TINDAK LANJUT
1.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam , yang menjadi dasar hukum dan pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan juga telah ditetapkannya peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021. 2. Selain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan serah simpan karya cetak dan karya rekam, Dasar hukum “Mengingat” yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, sudah tidak sesuai lagi, yakni : a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-UNdang, sudah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, untuk itu disarankan untuk diganti dengan menyusun rancangan Peraturan daerah yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

			diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, sudah diakomodir dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 3. Terdapat banyak perbedaan materi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991, antara lain : - Isilah-isilah dan pengertian yang digunakan dalam Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. - Jenis/bentuk karya cetak dan karya rekam - Asas - Substansi terkait penyerahan karya cetak dan karya rekam - Pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam - Ketentuan sanksi, lebih mengarah kepada sanksi administratif, tidak lagi mengatur sanksi pidana.	
--	--	--	---	--

			4. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021, maka perda Nomor 9 Tahun 2014 tidak lagi memiliki daya hukum untuk dilaksanakan. 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 disarankan untuk diganti, karena substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021.	
2	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	1. Perda Nomor 4 Tahun 2015 disusun berdasarkan dan mempedomani a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. b. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010. c. Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010. d. Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah dicabut dan diganti, dengan lahirnya : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017	

			tentang jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. b. Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. 3. Kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi yang diatur dalam perda 5 tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2022. 4. Lahirnya Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2022, beberapa peraturan teknis terkait berpengaruh terhadap materi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, antara lain terkait dengan substansi : a. Pengertian/istilah/singkatan b. Asas c. Kewenangan Pemerintah Provinsi (yang berpengaruh cukup besar terhadap perubahan materi muatan perda) d. Peran serta masyarakat e. Forum Jasa Konstruksi Daerah 5. Perubahan materi muatan Perda tersebut, menyebabkan esensi, makna dan sistematisa perda Nomor 4 tahun 2015, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
3.	Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun tentang 2018 Sistem	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Berbasis	1. Substansi Peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu disesuaikan dengan Peraturan	

Pemerintahan Berbasis Elektronik	Elektronik.	Presiden 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan SPBE di daerah. 2. Meskipun ditetapkan dalam tahun yang sama, Perda Nomor 20 Tahun 2018 disusun sebelum lahirnya Perpres 95 Tahun 2028, sehingga terkendala dalam penyusunan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya. 3. Substansi Perda Nomor 20 Tahun 2018 yang perlu disesuaikan dengan Perpres 95 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan teknis terkait serta kebutuhan/hasil evaluasi pelaksanaan perda di lapangan lebih dari 50%, sehingga perda tersebut disarankan untuk diganti.	
----------------------------------	-------------	--	--

a.n. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra,
u.b.

Kepala Biro Hukum



Masheri Yanda Boy, SH

Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 19700903 199803 1 003